

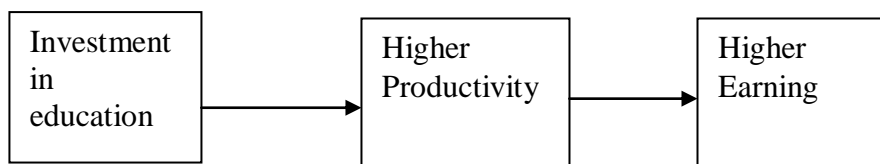
Pengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan

Di Negara yang sudah maju Pendidikan dipandang sebagai aspek konsumtif dan investatif (Human Investment) dan menjadi leading sector.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas(angka kelahiran) masyarakat.

Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam meghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi, pada umumnya pendidikan diakui sebagai investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas.

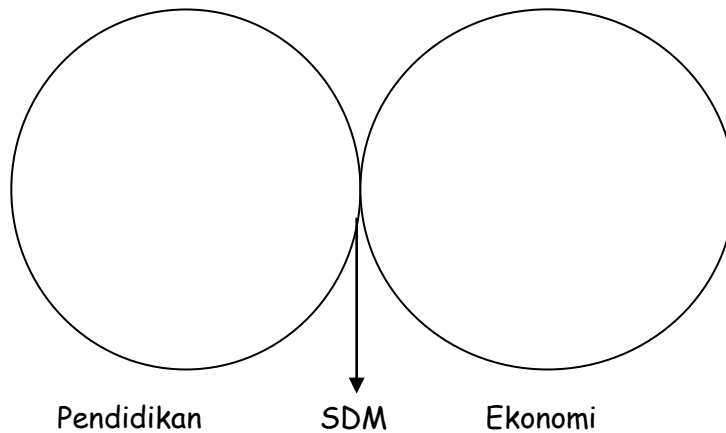
Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan *human capital*, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemikiran ini dikonseptualisasikan oleh Elchanan Cohn (1979) dalam suatu model sebagai berikut :



Gambar : Pendekatan Human Capital dalam Pendidikan (Cohn,1970:29)

Jika dicermati, bahwa pendidikan berfungsi untuk memberikan kemampuan pada seseorang agar mampu berperan dalam kehidupannya kelak, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Bila berbicara mengenai investasi manusia, jelas tidak boleh lepas dari fungsi pendidikan. Adam Smith dan Alfred Marshall (dalam Knezvich, 1975:539) mengemukakan keyakinannya bahwa "*the most valuable of all capital is that invested in human beings*".

Pendidikan dan ekonomi yang meyambungkannya menjadi SDM/SDI



Jadi : BIAYA akan bermakna apabila tercipta KUALITAS (MUTU)

Pendidikan berharga dilihat dari sudut pandang Ekonomi : bahwa semakin tinggi ilmu semakin tinggi pendapatan. (sedangkan barang makin lama makin berkurang nilainya (depresiasi)

Keuntungan dari Pendidikan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :

- Functional benefit : keuntungan yang dapat menghasilkan
- Emotional benefit : hanya untuk kepuasan

Dalam kaitannya dengan SDM, pendidikan tidak hanya untuk mendapatkan ijazah dan gelar, tetapi adanya perubahan tingkah laku yang mempunyai Nilai Ekonomis dalam kehidupannya.

Mantan Presiden U.S. George Bush, pernah mengatakan : "Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan ditentukan oleh Mutu PBM di kelas"

Sedangkan Schultz mengatakan "Kegagalan ekonomi Negara diakibatkan oleh kurang baiknya Mutu Pembelajaran".

Jadi, kesimpulannya adalah manusia merupakan atau dipandang sebagai modal. manusia (yang bagaimana ?), yang mempunyai profesionalisme (skill) dalam kehidupannya, karena manusia mempunyai harga yang dapat diketahui dari ide-ide (pemikiran) sehingga akan melahirkan kreativitas yang diciptakannya, akibat dari hasil pendidikan yang diperolehnya.

Model Pembiayaan Pendidikan

Menurut Thomas H. Jones dalam bukunya "*Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*"(1985:250), mengungkapkan tentang prinsip-prinsip atau model pembiayaan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu :

1. ***Flat Grant***, model ini mendistribusikan dana-dana negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh pajak lokal atau pembagian sama rata.
2. ***Full State Funding***, model ini pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh negara yaitu menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak.
3. ***The Foundation Plan***, model ini ditekankan pada patokan tarif pajak property minimum dan tingkat pembelanjaan minimum untuk setiap distrik sekolah lokal di negara bagian.
4. ***Guaranteed Tax Base***, model ini merupakan matching plan, dimana negara membayar presentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah.
5. ***Percentage Equalizing***, model ini merupakan bentuk dari *Guaranteed Tax Base*, dimana negara menjamin untuk memadukan tingkat-tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber-sumber negara.
6. ***Power Equalizing***, model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian.

Biaya Pendidikan

Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan mencakup dua aspek yaitu :

1. Dimensi Penerimaan atau Sumber dana (SPP, BP3/DSP, Hasil penerimaan dari Pemerintah/UYHD, Bantuan Pengembangan (Life Skill, BOMM, DBO, BBE), Sumbangan sukarela dari masyarakat)
2. Dimensi Pengeluaran (Untuk negeri :Peningkatan KBM, Peningkatan Pembinaan Kesiswaan, Peningkatan Kualitas personil, Pemeliharaan, Kegiatan rumah tangga sekolah. Untuk Swasta : Gaji/Kesra guru dan pegawai, PBM, Pemeliharaan sarana dan prasarana, Pengadaan sarana dan prasarana, Kegiatan ekstrakurikuler, Daya dan jasa, TU, Lain-lain)

Kedua dimensi tersebut dapat dilihat pada Anggaran (Budget) Pendidikan.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Johns, Edgar L. Morphet dan Kern Alexander (1983:45) yang menyatakan bahwa

"Education has both private and social cost, which may be both direct and indirect, direct cost are incurred for tuition, fees, books, room and board. In a public school, the majority of these costs are subsumed by the public treasury and thus become social costs. Indirect costs of education are embodied in the earnings which are forgone by all persons of working age, but forgone earnings are also a cost to society, a reduction in the total productivity of the nation".

Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan biaya langsung berasal dari sistem persekolahan sendiri seperti SPP, dan Sumbangan Orang Tua murid untuk pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri oleh siswa untuk membeli perlengkapan dalam melaksanakan proses pendidikannya, seperti biaya buku, peralatan dan uang saku. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar (Cohn,1979; Thomas Jone,1985; Alan Thomas, 1976. dalam Nanang Fattah 2000,23).

Menurut Cohn (1979:62), biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. *Biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti gaji guru, pegawai non edukatif, buku-buku pelajaran dan bahan perlengkapan lainnya. Hal ini berpengaruh pada hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut.*
- b. *Biaya tak langsung (Indirect cost), yaitu meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.*

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya yang nyata sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji dan dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa.

Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan. Biaya kesempatan (*income forgone*) yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Dengan demikian, biaya keseluruhan (C) selama di tingkat persekolahan terdiri dari biaya langsung (L) dan biaya tidak langsung (K). Dalam rumusannya digambarkan sebagai berikut :

$$C = L + K$$

Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Dalam rumusannya adalah :

$$S_b(s,t) = f [K(s,t) \text{ dibagi } M(s,t)]$$

Dimana :

- S_b : Satuan biaya per murid per tahun
- K : Jumlah seluruh pengeluaran
- M : Jumlah murid
- s : Sekolah tertentu
- t : Tahun tertentu

Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah (Nanang Fattah,2000:25).

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa pembiayaan pada suatu persekolahan terpusat pada penyaluran keuangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya untuk pendidikan. Dimana, distribusi atau penyaluran tersebut mencakup dua kategori yaitu bagaimana uang itu diperoleh dan bagaimana dibelanjakan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Aspek penting lain yang perlu dikaji adalah peraturan perundang-undangan pendidikan, perkembangan historis pemerintah pusat, kecenderungan termasuk masa yang akan datang.

Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya pendidikan perlu di dukung dengan data dan informasi mengenai siapa yang harus dididik, berapa jumlah yang harus dididik, tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai, program pendidikan apa yang akan dilakukan sebagai suatu usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Mengukur Manfaat Biaya Pendidikan (*Cost Benefit Analysis*)

Manfaat biaya pendidikan oleh para ahli pendidikan sering disebut dengan *Cost Benefit Analysis*, yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. (Nanang F., 2000:38).

Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan yaitu :

1. Dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
2. Dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan
3. Besarnya penghasilan/gaji yang diterima
4. Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya dan politik.

Istilah efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran) dari suatu pelaksanaan proses pendidikan.

Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Kedua konsep tersebut satu sama lain erat kaitannya.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata lama belajar (*Average study time*)

Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang lulusan menggunakan waktu belajarnya dengan cara menggunakan statistic kohort (kelompok belajar). Cara penghitungannya adalah jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu kohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam kohort tersebut.

2. Rasio Input - Output (*Input-Output Ratio (IOR)*)

Merupakan perbandingan antara jumlah murid yang lulus dengan murid yang masuk awal dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya, membandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran.

Sedangkan Efisiensi eksternal, sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*. Efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social sebagai dampak dari hasil pendidikan. Pada tingkat makro bahwa individu yang berpendidikan cenderung lebih baik memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan kesehatan yang baik.

Dalam menganalisis efisiensi eksternal, dalam bidang pendidikan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

1. Keuntungan perorangan (*private rate of return*)

Yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya pendidikan dari individu yang bersangkutan.

2. Keuntungan masyarakat (*social rate of return*)

Yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya pendidikan masyarakat

Jadi, efisiensi eksternal pendidikan meliputi tingkat balik ekonomi dan investasi pendidikan pada umumnya, alokasi pembiayaan bagi jenis dan jenjang pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi internal dan efisiensi eksternal mempunyai kaitan yang sangat erat. Kedua aspek tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam menentukan efisiensi system pendidikan secara keseluruhan (Cohn, 1979; Mingat Tan, 1988, dalam Nanang Fattah, 2000:40).

Dalam analisisnya dapat digunakan metode RoR (Rate of Return) atau tingkat kembali, dimana membandingkan keuntungan moneter dengan biaya pelaksanaan program, yang mencakup perhitungan perkiraan biaya- biaya. Rumusannya adalah :

$$ROR = \frac{NetIncome}{Investasi}$$

Pedoman yang perlu diperhatikan setelah melakukan perhitungan tersebut adalah :

1. Jika RoR-nya lebih besar dari investasi, maka proyek tersebut layak dilaksanakan.
2. Jika RoR-nya lebih kecil dari investasi, maka sebaiknya proyek tersebut jangan dilaksanakan
3. Jika RoR-nya = 0, maka proyek tersebut tidak untung dan tidak rugi (Break Event Point).

Sedangkan *cost benefit* dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan. Terdapat dua hal penting dalam hal investasi tersebut, yaitu :

1. Investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi di luar intrinsiknya.
2. Nilai guna dari kemampuan

Karena keuntungan tersebut bukan dalam bentuk uang, maka diperlukan penyesuaian cara-cara dalam memperhitungkannya, yaitu dengan cara menentukan nilainya berdasarkan atas biaya perbandingan pengeluaran untuk barang-barang yang tidak dapat dipasarkan. Hal ini dapat dinyatakan secara simbolis, sebagaimana formula Zymelman (1975) sebagai berikut :

$$B_t = B_p + B_{nP}$$

Dimana :

B_t : jumlah keuntungan

B_{nP} : $C_t - B_p$

B_p : Keuntungan bukan moneter

C_t : Jumlah biaya

Dalam kaitan ini Zymelman (1975) dengan jelas mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana secara efisien. MAkin efisien system pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pendidikan.

Artinya dengan dana yang tersedia dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan dan masyarakat.

PEMBUKUAN

Pembukuan meliputi pencatatan berbagai transaksi yang terjadi yang merupakan implementasi dari penganggaran, dimana seorang bendaharawan harus menguasai tatacara pembukuan yang baik.

Ada 3 macam bendaharawan, yaitu :

- a. Bendaharawan umum
- b. Bendaharawan khusus untuk penerimaan pendapatan tertentu
- c. Bendaharawan khusus untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu

Teknik pembukuan dalam buku kas umum (BKU) dilakukan sebagai berikut :
Semua penerimaan dibukukan sebelah kiri yang disebut sisi Debet. Dan pengeluaran dibukukan sebelah kanan (kredit).

Jenis buku untuk pencatatan selain BKU yang harus dibuat oleh bendaharawan adalah Buku Bank (sebagai alat control) dan Buku Kas Umum. Ada dua macam model buku kas umum yaitu BKU dalam bentuk Scontro dan Tabel Laris.

Dalam pembukuan kadang-kadang terdapat selisih/Kurang, dimana sebenarnya tidak boleh terjadi (harus sesuai dengan saldo kas)

Selisih/kurang disebabkan karena :

- Uang yang tercuri, hilang, kebongkaran, kebakaran, dsb.
- Lipatan uang yang kurang, yang mungkin tidak dihitung terlebih dahulu
- Pembulatan keatas atau ketiadaan uang kecil untuk pembayaran
- Kuitansi pengeluaran yang lupa dibukukan

PENGAWASAN KEUANGAN PENDIDIKAN

Pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku, daftar serta laporan), antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan.

Aparat pengawasan keuangan diantaranya adalah Direktorat Jendral Pengawasan keuangan Negara (DJKN) yang dirubah menjadi BPK.

Ide tersebut bukan semata-mata ditekankan pada keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, tetapi menjangkau peningkatan efektivitas, efisiensi atau penghematan.